



## PENINGKATAN LITERASI UMKM DALAM AKSELERASI MENJADI BANKABLE

Iswahyudi<sup>1)</sup>; Suwarni<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Study Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

<sup>2)</sup> Department Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [Iswahyudi.bsm@gmail.com](mailto:Iswahyudi.bsm@gmail.com); <sup>2)</sup> [Suwarni.H13@gmail.com](mailto:Suwarni.H13@gmail.com)

### ABSTRAK

Tumbuhnya UMKM dapat menambah penciptaan lapangan pekerjaan, pengurangan pengangguran dan dapat membantu dalam hal pemberantasan kemiskinan masyarakat. Namun saat ini UMKM masih terkendala pada hal pengelolaan keuangan dan keterbatasan dana untuk memproduksi secara masal, padahal potensi untuk berkembang sangat besar. Kendala tersebut sebenarnya bisa diantisipasi dengan adanya program pemerintah yaitu berupa KUR atau pinjaman lunak dari perbankan atau lembaga keuangan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mengembangkan UMKM, namun persyaratan yang harus disiapkan ketika mengajukan pinjaman salah satunya adalah *bankable* dimana UMKM harus menyediakan laporan keuangan. Proses penyusunan laporan keuangan inilah yang belum dipahami oleh pelaku UMKM hal tersebut disebabkan karena kurangnya/ minimnya pengetahuan dan pemahaman UMKM terhadap keberadaan lembaga keuangan, yang dikenal dengan sebutan literasi keuangan.

**Kata Kunci : UMKM, Literasi Keuangan, Bankable**

### ABSTRAC

*The growth of MSMEs can increase job creation, reduce unemployment and can help in terms of eradicating community poverty. However, currently MSMEs are still constrained in terms of financial management and limited funds for mass production, even though the potential to develop is very large. These obstacles can actually be anticipated by the existence of government programs in the form of KUR or soft loans from banks or financial institutions as a form of government support in developing MSMEs, but one of the requirements that must be prepared when applying for a loan is bankability where MSMEs must provide financial reports. The process of preparing financial reports is what MSME actors have not understood, this is due to the lack of knowledge and understanding of MSMEs of the existence of financial institutions, known as financial literacy.*

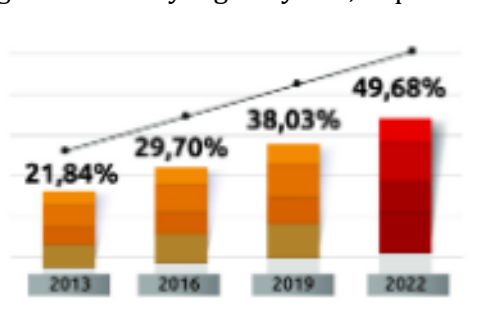
**Keywords: MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) , Financial Literacy, Bankable**

### PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Tingkat pengangguran dan penyerapan lapangan pekerjaan yang rendah menyebabkan tingkat kemiskinan masih tinggi. Salah satu cara untuk meningkatkan lapangan pekerjaan adalah mengembangkan usaha mikro dan kecil, menyediakan lebih banyak pekerjaan sesuai dengan besarnya modal yang diinvestasikan di usaha-usaha mikro dan kecil. Hambatan terbesar yang dihadapi UMKM adalah lemahnya distribusi produk-produk yang dihasilkan, lemahnya manajemen usaha, serta akses pada sumber-sumber pembiayaan formal khususnya perbankan. UMKM dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM sangat berperan dalam perkembangan teknologi yang modern, tetapi ada juga UMKM yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman akibat melonjaknya suku bunga perbankan, selain itu adanya kesulitan dalam proses produksi akibat melonjaknya harga bahan baku

mengenai literasi keuangan (*financial literacy*) telah hangat dibicarakan khusus terhadap pengetahuan tentang literasi keuangan terhadap keinginan suatu negara untuk memiliki warga negara yang berkualitas dan memiliki pengetahuan finansial yang baik, sehingga akan meningkatkan roda perekonomian suatu negara. Masa sekarang ini pengetahuan tentang literasi keuangan merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi masyarakat khususnya UMKM, sehingga UMKM memahami akan literasi keuangan tersebut. Peningkatan literasi keuangan telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan UMKM dalam merencanakan, mengelola keuangan sampai pengontrolan keuangan.

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03 persen.



Sumber : ojk.go.id

**Gambar 1. Indeks Literasi Keuangan 2022**

Dampak dari peningkatan pengetahuan Literasi Keuangan UMKM mengetahui mengelola keuangannya sendiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan UMKM tersebut. Salah satu faktor penting dalam perekonomian suatu daerah yaitu literasi keuangan bagi UMKM demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya pelaku UMKM suatu daerah karena UMKM saat ini memiliki potensi bisnis yang sangat besar dan pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan potensi tersebut melalui program-program yang terus diselenggarakan, karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, tenaga kerja lokal, dan modal dapat terserap dan kontribusinya dalam PDRB juga cukup besar (Setyobudi, 2007).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Literasi Keuangan

Menurut The Association of Chartered Certified Accountants (2014), konsep literasi keuangan meliputi pengetahuan mengenai konsep keuangan, kemampuan memahami komunikasi tentang konsep keuangan, kecakapan mengelola keuangan pribadi/perusahaan, dan kemampuan melakukan keputusan keuangan dalam situasi tertentu. Tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni, Well literate, yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, sufficient literate, memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, less literate, hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan, dan not literate, tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Literasi Keuangan memberikan manfaat, seperti mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)).

Ada beberapa dimensi dalam literasi keuangan diantaranya financial knowledge (pengetahuan keuangan), financial behaviour (perilaku keuangan), dan financial attitude (sikap

keuangan). Financial knowledge adalah edukasi mengenai tata cara pengelolaan keuangan pribadi untuk menghadapi masa depan dengan kemandirian ekonomi. Menurut Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016) yang dikutip dari Kholilah dan Iramani (2013), financial knowledge adalah penguasaan seseorang atas berbagai hal tentang dunia keuangan. Pengetahuan keuangan meliputi pengetahuan umum keuangan pribadi, tabungan dan pinjaman, asuransi, dan investasi. Financial Behaviour menurut Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016) dikutip dari Kholilah dan Iramani (2013), financial behaviour adalah kemampuan seseorang melakukan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. Perilaku keuangan seseorang dapat dilihat dari empat hal, yaitu konsumsi, manajemen arus kas, menabung dan berinvestasi, serta manajemen utang. Menurut Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016) dalam Pankow (2003), mendefinisikan financial attitudes sebagai keadaan pikiran, pendapat serta penilaian tentang keuangan. Menurut Furnham (1984) yang dikutip Irine Herdjiono dan Lady Angela Damanik (2016), financial attitudes tercermin dalam enam konsep berikut yaitu (1) Obsession, merujuk pada pola pikir seseorang tentang uang dan persepsinya tentang masa depan untuk mengelola uang dengan baik; (2) Power, yaitu merujuk pada seseorang yang menggunakan uang sebagai alat untuk mengendalikan orang lain dan menurutnya uang dapat menyelesaikan masalah; (3) Effort, merujuk pada seseorang yang merasa pantas memiliki uang dari apa yang sudah dikerjakannya; (4) Inadequacy, merujuk pada seseorang yang selalu merasa tidak cukup memiliki uang; (5) Retention, merujuk pada seseorang yang memiliki kecenderungan tidak ingin menghabiskan uang; dan (6) Security, merujuk pada pandangan seseorang yang sangat kuno tentang uang seperti anggapan bahwa uang lebih baik hanya disimpan sendiri tanpa ditabung di Bank atau untuk investasi.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, UMKM terdiri dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Badan Pusat Statistik mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, yang mana usaha mikro mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 5 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 5-19 orang, dan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja sebanyak 20-99 orang.

Kriteria UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 diantaranya usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan memiliki omset sebesar Rp 300.000.000 per tahun. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih minimal Rp 50.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) serta omset penjualan sebesar Rp 300.000.000 - Rp 2.500.000.000 per tahun. Sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan bersih sebesar Rp 500.000.000 - Rp 10.000.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset penjualan tahunan sebesar Rp 2.500.000.000 - Rp 50.000.000.000.

Selain berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008, kriteria UMKM berdasarkan sudut pandang perkembangannya dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu livelihood activities, mikro enterprise, small dynamic enterprise, dan fast moving enterprise. Livelihood activities merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal, seperti pedagang kaki lima. Micro enterprise,

merupakan UKM yang baru memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Fast moving enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan bersiap melakukan transformasi menjadi usaha besar.

### **Penguatan UKM Melalui Bankable**

Sejauh ini terdapat sejumlah tantangan pengembangan UMKM yaitu soal manajemen, produksi, pemasaran, dan pembiayaan. Bank Indonesia dalam paparannya mengungkapkan bahwa berbagai program strategis BI bagi pengembangan UMKM di tanah air antara lain diarahkan untuk mendukung UMKM komoditas volatile food (VF) dalam rangka mengurangi tekanan inflasi komponen bergejolak (VF) dari sisi pasokan; mendorong UMKM berorientasi ekspor dan mendukung pariwisata dalam rangka mengurangi CAD; mendorong peningkatan akses keuangan; mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam rangka memperluas akses pemasaran, pembiayaan transaksinya; dan mendorong keikutsertaan dalam pameran dan event internasional untuk akses pasar global. "Di samping itu, kami juga terus gencar melakukan literasi keuangan terutama yang berbasis digital terhadap pelaku UMKM sekaligus juga pemasaran dengan sistem e-commerce.

Sekitar 19,94% UMKM di Indonesia yang mampu mengakses pembiayaan dari sektor perbankan. Artinya, masih banyak UMKM terlebih lagi wirausaha pemula (mikro) yang belum menikmati akses perbankan (Boediono., 2005). "Ada banyak lembaga keuangan alternatif untuk membiayai UMKM dan wirausaha pemula, tidak hanya perbankan. Kehadiran koperasi memang untuk mendukung usaha dari anggotanya (UMKM). Saat ini, di Indonesia ada sekitar 20.852 unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang bisa dijadikan sandaran permodalan bagi UMKM dan wirausaha pemula. "Di Kemenkop juga ada program skim khusus bagi startup capital. Pasalnya, kami menyadari, aspek modal menjadi bagian penting untuk peningkatan usaha," kata Yuana seraya menyatakan, periode 2011-2018 sudah ada sebanyak 20 ribu lebih wirausaha pemula yang mendapat program WP dari Kemenkop Untuk tahun 2020, ditargetkan sebanyak 2500 orang wirausaha pemula dengan total dana sebesar Rp30 miliar. "Masing-masing wirausaha pemula bisa mendapat bantuan permodalan hingga maksimal Rp12 juta.

BI mendorong pelaku UMKM untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga sangat murah, yakni 6% pertahun. "Tahun 2022 ini disiapkan subsidi bunga KUR sebesar 3%. Meski begitu, ada beberapa tantangan yang membelit para wirausaha pemula. Diantaranya, unbankable, kesulitan pemasaran, hingga masih rendahnya pemahaman bisnis. "Kita bina mereka hingga usaha mereka fisible, dan juga bankable.

Wirausaha pemula masih banyak yang ragu berhubungan dengan bank. "Ini yang harus didorong agar mereka berani mengakses dana perbankan. Apalagi, syarat mendapatkan KUR terbilang mudah, yaitu usaha sudah berjalan selama enam bulan dengan ada surat keterangan ijin usaha. Diharapkan, praktik rentenir di masyarakat bisa hilang.

### **Hubungan antara inklusi keuangan, bank, dan UMKM**

Keberadaan inklusi keuangan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama. Keduanya tak terpisahkan, dan jika dikembangkan dengan optimal maka dapat membawa kondisi ekonomi ke level pertumbuhan yang berkualitas. Inklusi keuangan merupakan suatu sistem layanan keuangan yang didesain khusus bagi pemenuhan hak kalangan masyarakat yang tidak layak (unbankable) agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan semakin produktif. Oleh karena itu, dalam salah satu upaya peran aktif dalam program inklusi keuangan, Adapun jika digambarkan pada alur hubungan hubungan antara inklusi keuangan, bank dan UMKM adalah sebagai berikut :



**Gambar 2. Hubungan antara inklusi keuangan, bank, dan UMKM**

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Edukasi keuangan merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman. Ketika literasi (pemahaman) diperoleh, maka pelaku UMKM akan tanpa ragu akan mudah memanfaatkan fasilitas akses yang diberikan oleh lembaga keuangan perbankan sebagai financial intermediary dalam bentuk inklusi keuangan keagenan, sehingga pelaku UMKM untuk memilih produk inklusi keuangan yang tepat untuk mengembangkan bisnis lain dari usahanya sehingga dapat menaikkan pendapatan dan modal untuk berusaha yang berkelanjutan.
2. Fasilitas yang diberikan berupa program inklusi keuangan dari lembaga intermediasi, dan saluran distribusi berpengaruh positif. Akses yang diberikan dalam program inklusi keuangan, kualitas akses yang diberikan oleh perbankan berpengaruh positif terhadap jumlah transaksi dan volume transaksi (usage) maka ini juga akan berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku UMKM.
3. Secara tidak langsung sektor pemerintah juga memberikan dukungan dan memberikan hasil positif atas program inklusi keuangan ini, terbukti pada beberapa program pengentasan kemiskinan pemerintah lebih memilih program keagenan yang merupakan program inklusi keuangan sebagai mitra penyalur dari pada lembaga keuangan seperti bank, koperasi dan kantor pos. Hal ini berpengaruh positif terhadap pendapatan pelaku UMKM yang turut serta pada program inklusi keuangan keagenan.
4. Bagi masyarakat yang berada dilokasi yang tak terjangkau oleh lembaga keuangan formal seperti bank, mampu mengakses layanan keuangan yang setidaknya mampu memberikan fasilitas dan layanan keuangan seperti layaknya lembaga keuangan formal.

### Saran

1. Sistem inklusi keuangan yang sering down dan under maintenance, merupakan kendala yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM, jika ini berlanjut maka akan berdampak pada akses, penggunaan (usage), dan kualitas yang menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan yang harus dilakukan oleh pemilik dan pengembang program. Jika terus berlanjut, maka tidak hanya pendapatan pelaku UMKM yang menurun, namun tingkat minat masyarakat selaku pengguna program ini juga akan mengalami penurunan
2. Pelaku UMKM merupakan masyarakat biasa, dan bukan banker profesional di lembaga keuangan yang memiliki kode etik perbankan, oleh karena itu, tingkat pemahaman atas prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan data nasabah yang bertransaksi melalui program inklusi keuangan keagenan tetap terjaga. Lebih baik pelaku UMKM dibekali lebih mendalam oleh lembaga keuangan yang berperan sebagai financial intermediary dan saluran distribusi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, karena topik yang diangkat masih baru dan terus berkembang serta masih banyak hal yang perlu dilakukan kajian ulang dan perbaikan.

### Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh karena ini pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Suwarni, S.Kom., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen Bengkulu
2. Dr. E. Ahmad Soleh, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen dan pembimbing / Tim Penelitian yang telah membimbing dengan memberikan yang terbaik untuk kelancaran penulis. Terima kasih atas waktu serta masukan yang sangat bermanfaat.
3. Kedua orang tua dan Istri serta putra-putri kami yang selalu memberi motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

### REFERENSI

- ACCA. (2014). Financial education for entrepreneurs : what next? In The Association of Chartered Certified Accountants.
- Andang Setyobudi. 2007. Peran Serta Bank Indonesia dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 5 No. 2, Agustus.
- Boediono. (2005). Professor Mubyarto, 1938–2005. Bulletin of Indonesian Economical Studies, 41(2), 159-161.
- Herdjiono, Irine, dan Damanik, Lady Angela. (2016). Pengaruh Financial Attitude, Financial Knowledge, Parental Income Terhadap Financial Management Behaviour. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan. Vol. 9 No. 3, Hal. 226-241.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022. Jakarta: OJK
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah”.



